
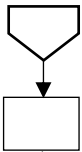

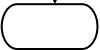





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

NOMOR SOP	: PHN-OT.02.02-42
TGL. PEMBUATAN	: 18 Juni 2021
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional  Ditandatangani secara elektronik oleh : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum. NIP. 19710501 199303 1 001
NAMA SOP	SOP PENYIAPAN KONSEP PROLEGNAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI STAF :
<ol style="list-style-type: none">UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2012 tentang Tata Naskah DinasPeraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan teknik penyusunan Program Penyusunan Rancangan PP dan PerpresMemiliki kemampuan teknik perancangan peraturan perundang-undanganMemiliki kemampuan substansi bidang hukum
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">Biro Hukum Kementerian/LPNKUnit Kerja yang Terkait	<ol style="list-style-type: none">Program kerjaTerm of ReferenceKomputer/Printer/ScannerJaringan internetTelepon dan Fax
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika tidak dilaksanakan maka perencanaan penyusunan program penyusunan rancangan PP dan Perpres tidak tersusun secara terencana, terpadu dan sistematis	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual

NO	AKTIVITAS	Pelaksana						MUTU BAKU			KET
		Menteri	Kabadan	Kapusren	Kabid	Kasubid	JFU/JFT	Perlengkapan	waktu	Out Put	
1.	Menteri melakukan penyiapan konsep awal Prolegnas dengan berkoordinasi dengan Tim Pengarah (Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Mendagri, Mensetneg)										
2.	Menteri memberikan disposisi kepada Kabadan untuk melaksanakan penyiapan konsep awal Prolegnas dan menyelenggarakan Rapat Tim Pengarah								ATK, Peraturan Per-UU-an	1 hari	Dokumen
3.	Kabadan memberikan disposisi kepada Kapusren untuk menyiapkan konsep awal Prolegnas dan menyiapkan pelaksanaan Rapat Tim Pengarah										
4.	Kapusren memberikan disposisi kepada Kabid untuk menyiapkan konsep awal Prolegnas melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prolegnas tahun berjalan dan melakukan inventarisasi kebutuhan RUU								ATK, Aplikasi, Peraturan Per-UU-an	1 hari	Dokumen
5.	Kabid memberikan disposisi kepada kasubid untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prolegnas tahun berjalan serta melakukan inventarisasi kebutuhan RUU berdasarkan amanat UUD NRI Tahu 1945, Ketetapan MPR, perintah UU lainnya, sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJM, rencana kerja pemerintah, hasil analisa dan evaluasi hukum, serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.								ATK, Aplikasi, Peraturan Per-UU-an	1 hari	Dokumen
6.	Kasubid mengoordinasikan JFU dan Perancang PUU untuk mengumpulkan data dukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prolegnas tahun berjalan dan melakukan inventarisasi kebutuhan RUU								ATK, Aplikasi, Peraturan Per-UU-an	14 hari	Dokumen
7.	Kabid mengadakan rapat untuk melakukan pembahasan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prolegnas tahun berjalan dan melakukan inventarisasi kebutuhan RUU								ATK, Surat, SK, LCD	3 jam	Notulensi dan Rekomendasi
8.	Kabid menyampaikan hasil pembahasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prolegnas tahun berjalan dan inventarisasi kebutuhan RUU sebagai konsep awal Prolegnas kepada Kapusren								ATK, draft usulan RUU	1 hari	Notulensi dan Rekomendasi usulan
9.	Kapusren menyampaikan konsep awal Prolegnas kepada Kabadan								ATK, draft usulan RUU	1 hari	Dokumen usulan Prolegnas

10.	Kabadan mengundang Tim Pengarah untuk menghadiri Rapat Tim Pengarah dalam rangka pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas tahun berjalan dan membahas konsep awal prolegnas							ATK, draft usulan RUU	1 hari	Notulensi dan Rekomendasi	
11.	Mendasarkan hasil rekomendasi Tim Pengarah, BPHN melakukan penyempurnaan konsep awal prolegnas							ATK, draft usulan RUU	1 hari	Dokumen	
12.	Kabadan melaporkan hasil penyiapan konsep awal Prolegnas kepada Menteri Hukum dan HAM							ATK, draft usulan RUU	1 hari	Dokumen	